

SEJARAH ISLAM DAN TRADISI KEILMUAN DI ACEH

Imran

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Aceh, Indonesia
email: Imran.muhammad@ar-raniry.ac.id

Abstract

Almost all historians state that the area of Indonesia where Islam first entered is Aceh. Only among these experts, there are differences of opinion regarding the certainty of the coming year of Islam. To understand the dynamics of Islam in Aceh, among others, it can be traced through the history of the early entry of Islam to the archipelago, the role of ulama and umara (rulers), the function of educational institutions, and the way people understand and practice Islamic teachings. The values and behavior of life in Aceh shows the Islamic style in almost all its aspects. This is mainly due to the prevailing socialization institutions, namely dayah education which has produced militant clerics, who are not tired of leading the community towards deepening religious knowledge and the process of Islamization. Most of the rulers, including the Sultan, had received training from the ulama or at least received fatwas from them.

Keywords: *Islam history; Scientific Traditions; Aceh*

Abstrak

Hampir semua ahli sejarah menyatakan bahwa daerah Indonesia yang mula-mula dimasuki Islam ialah daerah Aceh. Hanya di antara para ahli itu terjadi perbedaan pendapat mengenai kepastian tahun masuknya Islam. Untuk memahami dinamika Islam di Aceh, antara lain, dapat ditelusuri melalui sejarah awal masuknya Islam ke Nusantara, peran ulama dan umara (penguasa), fungsi lembaga-lembaga pendidikan, dan cara masyarakat memahami dan mengamalkan ajaran Islam. Nilai dan tingkah laku kehidupan di Aceh memperlihatkan corak Islam dalam hampir segenap aspeknya. Hal ini terutama disebabkan adanya pranata-pranata sosialisasi yang umum berlaku, yaitu pendidikan *dayah* yang telah menghasilkan ulama-ulama militan, yang tidak jemu-jemunya memimpin masyarakat kearah pendalaman ilmu agama dan proses Islamisasi.

Para penguasa, termasuk Sultan, sebagian besar pernah mendapat didikan para ulama atau sekurang-kurangnya pernah menerima fatwa dari mereka.

Kata Kunci: Sejarah Islam; Tradisi Keilmuan; Aceh

PENDAHULUAN

Secara geografis, daerah Aceh, sekarang disebut Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, merupakan provinsi yang terletak di kawasan paling ujung bagian Utara Pulau Sumatera yang sekaligus merupakan ujung paling Barat wilayah Indonesia. Batas-batas Nanggroe Aceh Darussalam adalah: sebelah Utara dan Timur berbatasan dengan Selat Malaka, sebelah Selatan berbatasan dengan Provinsi Sumatera Utara, dan sebelah Barat berbatasan dengan Samudera Indonesia. Satu-satunya hubungan darat hanyalah dengan Provinsi Sumatera Utara. Luas Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam 57.365,57 km².¹

Sesuai dengan perkembangannya, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dengan ibukota Banda Aceh semakin diperluas dari segi pemerintahannya dari 10 kabupaten/kota pada tahun 2000 menjadi 20 kabupaten/kota pada Mei 2003. Kabupaten/kota yang berkembang ialah: 1) Aceh Barat Daya (pecahan dari Aceh Selatan); 2) Gayo Lues (pecahan dari Aceh Tenggara); 3) Aceh Tamiang dan Kota Langsa (pecahan dari Aceh Timur); 4) Nagan Raya dan Aceh Raya (pecahan dari Aceh Barat); dan 5) Kabupaten Bireuen dan Kota Lhokseumawe (pecahan dari Aceh Utara). Kemudian, pada Januari 2004 bertambah menjadi 21 kabupaten/kota dengan kabupaten/kota baru yaitu Kabupaten Bener Meriah (pecahan dari Kabupaten Aceh Tengah. Di samping itu, Kabupaten Pidie merupakan kabupaten terbesar dilihat dari perangkat wilayah administrasinya.²

¹Lihat, *Aceh dalam Angka (Aceh in Figures)*, (Nanggroe Aceh Darussalam: Badan Pusat Statistik dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, 2003), hlm. 3.

²*Aceh dalam Angka...*, hlm. 13.

Jumlah penduduk di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) menurut sensus penduduk tahun 2003 sebanyak 4.218.486 jiwa, terdiri dari 2.119.628 laki-laki dan 2.098.858 perempuan. Dengan demikian, angka pertumbuhan penduduk Provinsi NAD periode 2002-2003 adalah 1,26 persen. Sejak akhir tahun 1999 perpindahan penduduk ke provinsi yang sering dilanda konflik ini menurun, sehingga penambahan penduduk hasil migrasi *netto* menurun drastis.³ Sementara itu penduduk yang keluar daerah juga tidak sedikit. Setelah bencana gempa bumi dan gelombang Tsunami tahun 2004, penduduk Aceh mengalami penurunan drastis karena korban bencana tersebut yang diperkirakan mencapai sedikitnya 300.000 jiwa.

Penduduk Provinsi NAD mayoritas beragama Islam dengan persentase 98,72 persen. Sedangkan yang lain beragama Kristen Protestan sebanyak 0,96 persen; beragama Budha sebanyak 0,16 persen; beragama Kristen Katolik sebanyak 0,14 persen. Selain itu, ada 0,02 persen beragama Hindu.⁴ Berdasarkan data ini dapat diketahui bahwa di Aceh terdapat pemeluk agama yang berbeda-beda. Namun, di tengah pluralitas agama tersebut, hampir tidak ditemukan konflik antar umat beragama sepanjang konflik yang pernah terjadi di bumi Serambi Mekah itu. Ini mengindikasikan bahwa masyarakat Aceh, secara sosiologis, dikenal ramah dan santun terhadap orang lain tanpa mempersoalkan agama yang dianutnya. Masyarakat Aceh juga ingin menunjukkan bahwa ajaran Islam menyuruh umatnya agar menghormati keberadaan para penganut agama lain. Secara kultural, masyarakat Aceh dikenal suka menerima tamu dan menyantuninya. Budaya kenduri (jamuan makan bersama) merupakan kebiasaan yang sudah melekat dalam jiwa orang-orang Aceh. Maka, dalam masyarakat Aceh setiap ada upacara adat dan agama tidak jarang ditemukan pesta jamuan makan bersama atau kenduri. Memuliakan dan menghormati tamu, dalam pandangan masyarakat Aceh, adalah wajib.

³*Aceh dalam Angka...*, hlm. 25.

⁴*Aceh dalam Angka...*, hlm. 64.

Dalam kehidupan sehari-hari, kadangkala didapati sebagian orang Aceh lebih mementingkan tamunya daripada dirinya atau keluarganya sendiri. Begitulah sebenarnya ciri khas masyarakat Aceh di mana tamu dianggap sebagai saudaranya sendiri.

Masyarakat Aceh memiliki struktur sosial tersendiri yang diatur berdasarkan hukum, *Qanun Meukuta Alam Al-Asyi* (undang-undang negara Aceh berdasarkan syari'at Islam). Kekuasaan tertinggi berada di tangan Sultan, sedangkan kekuasaan agama di tangan ulama. Di bawah Sultan ada *Ulee Balang* (hulu balang) yang menguasai wilayah tertentu dengan hak otonomi luas. *Ulee Balang* membawahi beberapa *Imum Mukim*⁵ dan di bawah *Imum Mukim* terdapat beberapa *Keuchik* (kepala desa). *Keuchik* dipilih oleh *Tuha Peuet* dan *Tuha Lapan*⁶ yang terdiri dari tokoh-tokoh desa.⁷

Selanjutnya, sistem pemerintahan Aceh, masa Kerajaan Aceh Darussalam, tersusun dari *gampong*, *mukim*, *nanggroe*, *sagoe*, dan kerajaan. Sebagai elaborasi istilah-istilah ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. *Gampong* (kampung), disebut juga *Meunasah* yang dipimpin oleh seorang *Keuchik* (kepala kampung). Sedangkan *Meunasah* dipimpin oleh seorang *Imum* (imam). *Gampong* diberi hak otonomi khusus.
2. *Mukim*, yaitu federasi dari beberapa *gampong*, sedikitnya delapan *gampong*. *Mukim* dipimpin oleh seorang *Imum Mukim* dan seorang *Kadhi Mukim* (hakim tingkat mukim) serta dibantu oleh beberapa orang wakil. Dalam setiap *Mukim* didirikan sebuah masjid untuk shalat jama'ah dan shalat Jum'at.
3. *Nanggroe*, biasanya disebut daerah *Ulee Balang* terdiri dari tiga sampai sembilan *Mukim*. *Nanggroe* dipimpin oleh seorang *Ulee Balang*

⁵ *Mukim* merupakan kumpulan dari beberapa kampung (desa), dan setiap mukim dipimpin oleh kepala mukim atau disebut juga *Imum Mukim*.

⁶ *Tuha Peuet* dan *Tuha Lapan* adalah tokoh-tokoh masyarakat berjumlah delapan orang yang diberikan wewenang untuk menyelesaikan perkara di suatu kampung, termasuk memilih dan mengangkat kepala kampung.

⁷ Lihat A.K. Jakobi, *Aceh Daerah Modal*, (Jakarta: Yayasan Seulawah, 1998), hlm.

dan dibantu oleh seorang *Kadhi Nanggroe*, dan mempunyai hak otonomi khusus dalam batas-batas tertentu.

4. *Sagoe*, ialah federasi dari beberapa *Nanggroe*. *Sagoe* ini dipimpin oleh seorang panglima, disebut *Panglima Sagoe* (Aceh: *Pang Sagoe*).
5. *Kerajaan*, dengan nama lengkapnya, Kerajaan Aceh Darussalam yang dipimpin oleh seorang raja yang bergelar Sultan Imam Malikul Adil dan dibantu oleh seorang Kadhi Kerajaan yang bergelar Kadhi Malikul Adil.⁸

Struktur seperti tertera di atas tidak sepenuhnya dianut dalam sistem pemerintahan sekarang. Namun, beberapa istilah, seperti *nanggroe*, *mukim*, dan *gampong* atau *meunasah* masih dipakai. Namun, struktur pemerintahannya sudah berubah karena sekarang mengikuti struktur yang ditetapkan pemerintah pusat. Sejak diberikan hak otonomi untuk Aceh, beberapa istilah populer dalam struktur pemerintahan masa lampau mulai digunakan kembali dengan modifikasi.

PEMBAHASAN

A. Sejarah Awal Masuknya Islam ke Aceh

Sebelum agama Islam masuk ke Aceh, Aceh telah menjalin hubungan dagang dengan negeri India, Persia, Arab, Tiongkok, dan sebagainya. Hubungan timbal balik ekonomi antara Aceh dengan dunia luar telah memberi pengaruh signifikan dalam kehidupan rakyat Aceh, seperti halnya orang India yang beragama Hindu datang ke Aceh, tentu membawa pengaruh terhadap penduduk Aceh baik secara langsung maupun tidak langsung. Namun, sejauh mana pengaruh tersebut belum dapat diketahui secara pasti. Menurut Mukti Ali, "agama Islam masuk ke Indonesia telah bercampur dengan elemen-elemen Hindu."⁹ Pernyataan ini ada benarnya jika sampelnya adalah agama Islam dalam masyarakat Jawa; tetapi tidak sepenuhnya benar bagi Islam dalam masyarakat Aceh.

⁸ Bandingkan, A. Hasjmy, *50 Tahun Aceh Membangun*, (Banda Aceh: MUI Aceh, 1995), hlm. 31-32.

⁹ Mukti Ali, *Alam Pikiran Modern di Indonesia*, (Jakarta: Tintamas, 1964), hlm. 4.

Karena, Islam di Aceh langsung dibawa oleh para saudagar Arab yang merantau ke Aceh; dan di Aceh ajaran Hindu tidak begitu mengakar seperti di Jawa.

Hampir semua ahli sejarah menyatakan bahwa daerah Indonesia yang mula-mula dimasuki Islam ialah daerah Aceh. Hanya di antara para ahli itu terjadi perbedaan pendapat mengenai kepastian tahun masuknya Islam. Dalam kaitan ini, ada tiga teori yang berkembang: *pertama*, agama Islam secara berangsur-angsur datang ke Indonesia sejak abad pertama Hijriyah atau sekitar abad ke-7 dan 8 Masehi; dan langsung dari Arab. *Kedua*, penyiaran Islam di Indonesia adalah dengan cara damai, bukan dengan pedang dan kekuasaan; dan *ketiga*, kedatangan Islam di Indonesia membawa kecerdasan dan peradaban yang tinggi dalam membentuk kepribadian Indonesia.¹⁰

Berkenaan dengan teori-teori kedatangan Islam di Indonesia, Azyumardi Azra mengakui bahwa sejauh menyangkut kedatangan Islam di Nusantara, terdapat diskusi dan perdebatan panjang di antara para ahli mengenai tiga masalah pokok: *pertama*, tempat asal kedatangan Islam; *kedua*, para pembawanya; dan *ketiga*, waktu kedatangannya. Menurut Azra, berbagai teori dan pembahasan yang berusaha menjawab ketiga masalah pokok ini jelas belum tuntas, tidak hanya karena keterbatasan data yang dapat mendukung suatu teori tertentu, tetapi juga karena sifat sepihak dari berbagai teori yang ada.¹¹

Kebanyakan sarjana asal Belanda memegang teori yang mengatakan bahwa asal usul Islam di Nusantara adalah anak Benua India, bukan Persia atau Arabia. Sarjana pertama yang mengemukakan teori ini adalah Pijnappel. Teori ini kemudian dikembangkan oleh Snouck Hurgronje, yang menegaskan bahwa begitu Islam berpijak kokoh di beberapa kota

¹⁰A. Hasjmy, *Sejarah Masuk dan Berkembangnya Islam di Indonesia*, (Bandung: PT. Alma'arif, 1993), hlm. 38-39.

¹¹Lihat, Azyumardi Azra, *Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII & XVIII* (Jakarta: Prenada Media, 2004), hlm. 2.

pelabuhan Anak Benua India, banyak di antara mereka tinggal di sana sebagai pedagang perantara dalam perdagangan Timur Tengah dengan Nusantara; kemudian datang ke Dunia Melayu Indonesia sebagai para penyebar Islam pertama. Selanjutnya, teori yang menyatakan bahwa Islam di Nusantara berasal dari Bengal.¹² Dengan kata lain, teori kedatangan Islam ke Indonesia dapat dibagi ke dalam dua kelompok: *pertama*, agama Islam datang ke Indonesia melalui Persia dan Gujarat; *kedua*, kedatangan agama Islam di Indonesia langsung dari Jazirah Arabia.

Setelah membahas teori-teori kedatangan Islam ke Nusantara secara panjang lebar, Azra menyimpulkan: *pertama*, Islam masuk ke Nusantara dibawa langsung dari Arabia; *kedua*, Islam diperkenalkan oleh para guru dan penyair “profesional”, yaitu mereka yang memang khusus bermaksud menyebarkan Islam; *ketiga*, yang mula-mula memeluk agama Islam adalah para penguasa; dan *keempat*, kebanyakan para penyebar Islam “profesional” itu datang ke Nusantara pada abad ke-12 dan ke-13 Masehi. Berdasarkan pertimbangan ini, mungkin benar bahwa Islam sudah diperkenalkan di Nusantara pada abad-abad pertama Hijriyah.¹³

Menyangkut masuknya Islam ke Aceh telah diadakan seminar sejarah Islam di Banda Aceh tahun 1978, sebagai kelanjutan seminar yang pernah diadakan sebelumnya di Medan tahun 1963, yang menegaskan bahwa agama Islam sudah masuk ke Nusantara pada abad pertama Hijriyah langsung dari tanah Arab. Kemudian, peserta seminar sepakat bahwa daerah yang mula-mula masuk dan menerima Islam di Nusantara adalah Aceh.¹⁴

Namun demikian, setelah mempelajari sejarah Islam dan teori-teori secara cermat mengenai masuknya Islam ke Nusantara, tidak dapat dipungkiri bahwa Islam masuk ke Aceh melalui dua jalur: *pertama*, Islam datang di Aceh langsung dari Saudi Arabia; dan *kedua*, Islam masuk ke

¹² Azyumardi Azra, *Jaringan Ulama...*, hlm. 3.

¹³ Azyumardi Azra, *Jaringan Ulama...*, hlm. 12.

¹⁴ A. Hasjmy, *op. cit.*, hlm. 52.

Aceh melalui para ulama (juru dakwah) dari Persia dan Gujarat India. Kedatangan para ulama ke Aceh dengan menggunakan perahu atau kapal laut. Ada di antara mereka yang khusus untuk berdakwah (menyebarkan Islam) dan ada pula yang bertujuan untuk dagang; namun di samping dagang mereka menyebarkan Islam. Ini menandakan bahwa Islam tidak dapat dipisahkan dari aktivitas ekonomi; dan sebagian pedagang dapat memanfaatkan sebagian waktu mereka untuk menyebarkan Islam kepada penduduk di mana mereka singgah. Ada indikasi kuat bahwa orang-orang Aceh terpengaruh oleh para penyebar Islam tersebut, misalnya dalam masyarakat Aceh sampai sekarang masih terdapat tradisi yang mirip dengan India, Persia, dan Arab, baik dalam tatacara berpakaian maupun makanan.

B. Tradisi Keilmuan di Aceh.

1. Ulama dan Lembaga Pendidikan Islam

Gelar ulama diperoleh seseorang dengan dua syarat: *pertama*, mempunyai pengetahuan agama Islam; dan *kedua*, adanya pengakuan dari masyarakat. Syarat pertama dapat dipenuhi seseorang sesudah ia menempuh masa belajar yang cukup lama. Sedangkan syarat kedua baru dapat dipenuhi setelah masyarakat melihat kemuliaan akhlak, kedalaman pengetahuan, dan ketaatannya terhadap ajaran agama Islam. Mengetahui saja tanpa mengamalkan pengetahuan itu tidak cukup untuk menarik pengakuan dari masyarakat. Di Aceh, ulama umumnya tamatan *dayah*¹⁵ (pesantren). Sedangkan tamatan universitas tidak disebut ulama.

Dalam masyarakat Aceh terdapat sekelompok ulama (tradisional) dipanggil dengan sebutan Teungku (Tgk) di depan namanya, sedangkan ulama intelektual umumnya jebolan Perguruan Tinggi. Ada kelompok turunan Raja/Sultan sering dipanggil dengan sebutan Tuwanku (Twk) di

¹⁵ Istilah *dayah* merupakan modifikasi dari kata *zawiyah* (bahasa Arab), yaitu suatu ruang atau tempat khusus yang digunakan oleh para praktisi ajaran tasawuf dari kelompok tarekat. Istilah ini kemudian diadopsi oleh ulama Aceh menjadi *dayah* sebagai tempat mengaji atau belajar ilmu-ilmu agama Islam. Di Jawa, istilah lebih dikenal dengan sebutan *pesantren*.

depan namanya. Kelompok turunan Ulee Balang/Bangsawan yang umumnya memegang kekuasaan di masa penjajah Belanda dipanggil dengan sebutan Teuku (T), di depan namanya. Di samping itu ada pula kelompok masyarakat Aceh yang menghubungkan diri mereka dengan keturunan keluarga Nabi Muhammad yang dipanggil dengan *Habib* atau lebih populer dengan Said (S) di depan namanya. Namun semua strata kedudukan sosial itu tidak menimbulkan hak-hak istimewa pada bidang sosial politik dalam masyarakat, melainkan tergantung pada kemampuan dan kekuatan usahanya.

Lembaga sistem pengendalian sosial melalui agama atau lembaga agama sangat mempengaruhi masyarakat Aceh. Lembaga agama seperti *dayah*/pesantren merupakan wadah pembentukan akhlak mulia. Di Aceh, pesantren menjadi lembaga panutan dalam membina dan membentuk pribadi muslim. Pesantren pada umumnya dipimpin oleh seorang ulama yang karismatik sehingga ia menjadi panutan bagi para santrinya. Namun, berbeda dengan santri di pesantren-pesantren di Jawa, santri pesantren di Aceh tidak begitu mengagungkan ulama. Jika seorang ulama melanggar ajaran agama maka ulama tersebut langsung jatuh martabatnya dan tidak lagi dihormati baik oleh santrinya maupun masyarakat di sekitarnya.

Lembaga agama seperti pesantren merupakan tempat mendidik kader umat yang bermoral tinggi dan dianggap sangat ampuh dalam membina dan mengayomi masyarakat sejak dulu, saat ini dan diprediksikan juga masa depan. Lembaga agama juga mampu menjadi media dalam membawa pembaharuan, terutama dalam pemikiran Islam. Lembaga agama di Aceh sejak dulu sangat berperan dalam mendidik masyarakat guna menjadi pemikir, pemimpin dan cendekiawan. Sebab sejak dulu merupakan lembaga agama di Aceh satu-satunya media untuk membina generasi muda baik segi agama maupun pendidikan umum. Peran pesantren atau *dayah* pada masa kejayaan Islam sangat menentukan dalam mengajak manusia kepada peradaban dan pembaharuan. Akan

tetapi peran pesantren menurun dalam bidang pendidikan umum setelah para penjajah datang. Para kolonialis memisahkan ilmu agama dengan ilmu umum, sehingga orang-orang yang pergi ke pesantren hanya diperbolehkan mempelajari tentang '*ubudiyah*¹⁶ saja. Namun demikian pesantren beserta para ulama sanggup menjadi panutan terutama dalam membina mental spiritual generasi muda. Dengan kata lain, pesantren merupakan media untuk menjaga kestabilan dan keharmonisan hidup dalam masyarakat Aceh .

Masyarakat Aceh sangat menghargai seorang ulama atau orang yang alim, karena seorang ulama selain sebagai *Waratsatul Anbiya'* (pewaris para nabi) sekaligus sebagai penuntun umat ke jalan Allah. Di samping itu, ulama sepenuhnya mengabdikan dirinya untuk masyarakat, tanpa melibatkan dirinya dalam kegiatan politik praktis. Setiap ulama yang melibatkan diri dalam politik praktis diragukan keberadaannya oleh masyarakat. Karena, dalam perspektif masyarakat Aceh, ulama yang berkecimpung dalam politik atau pemerintahan ternodai oleh perilaku menyimpang, seperti korupsi, penyalahgunaan wewenang atau jabatan, dan jauh dari masyarakat. Kana itu, pesantren tempo dulu enggan menerima sumbangan dari pemerintah. Keengganan menerima sumbangan dari pemerintah karena mereka menganggap sumbangan tersebut erat kaitannya dengan unsur-unsur politik. Yang mengikat, terutama pada masa Orde Baru. Biasanya pembangunan *dayah*/ pesantren dilakukan oleh ulama bekerjasama dengan masyarakat sekitarnya. Seorang ulama yang sudah terkenal alim dan berwibawa menjadi panutan dan tempat bertanya, baik bidang agama maupun bidang-bidang lainnya. Oleh karena itu warga masyarakat di kampung-kampung kadang-kadang memberikan zakat (sedekah wajib) dan *infaq* (sedekah sunat) kepada

¹⁶ Istilah ini dalam arti sempit lebih terfokus pada hubungan manusia dengan Allah semata, yaitu hanya melakukan ibadah secara formal, tanpa memikirkan urusan duniawi. Salah satu strategi kaum penjajah adalah memberi peluang kepada masyarakat terjajah untuk menjalankan ibadah menurut agama yang diyakininya dan membatasi gerak mereka dalam politik.

ulama. Agaknya, masyarakat lebih percaya kepada kejujuran seorang ulama daripada aparatur negara. Ini menandakan bahwa ulama dianggap lebih jujur daripada pejabat pemerintah.

Nilai dan tingkah laku kehidupan di Aceh memperlihatkan corak Islam dalam hampir segenap aspeknya. Hal ini terutama disebabkan adanya pranata-pranata sosialisasi yang umum berlaku, yaitu pendidikan *dayah* yang telah menghasilkan ulama-ulama militan, yang tidak jemu-jemunya memimpin masyarakat kearah pendalaman ilmu agama dan proses Islamisasi. Para penguasa, termasuk Sultan, sebagian besar pernah mendapat didikan para ulama atau sekurang-kurangnya pernah menerima fatwa dari mereka.

Pada masa lampau pendidikan di Aceh berjalan di bawah pimpinan para ulama. Di antara ulama-lama yang terkenal adalah Hamzah Fansuri, Syeikh Abdurrauf, Nuruddin Ar-Raniry, dan Syamsuddin As-Sumatrani baik pada kesultanan Aceh, maupun pada masa kesultanan Malikul Saleh kerajaan Pase di Aceh Utara. Selain itu ada sejumlah ulama besar yang sangat berperan dalam perjuangan melawan Belanda, yaitu Teungku Chik Di Tiro, Teungku Chik Pante Kulu, Teungku Chik Kuta Karang, dan Teungku Fakinah (wanita). Pengaruh ulama sangat besar, ulama tidak hanya menjadi panutan/pemimpin umat (*informal leader*) tetapi juga menjadi guru spiritual dan motivator perjuangan.

Ilmu agama Islam khususnya telah dipancarkan di wilayah Nusantara, sehingga banyak penuntut ilmu dari luar datang ke Aceh; dan sebaliknya penuntut-penuntut ilmu dari Aceh pergi merantau mencari ilmu ke daerah lain, seperti Saudi Arabia, India, Mesir, Turki, Iran, dan lain-lain. Berdasarkan warisan peninggalan dulu, kini pendidikan di Aceh berkembang pesat, baik sistem pendidikan tradisional maupun pendidikan modern. Ada empat bentuk lembaga pendidikan yang berkembang di Aceh hingga saat ini, sebagai berikut:

- a. Lembaga Pendidikan Tradisional

Lembaga pendidikan ini berbentuk dayah (pesantren) atau rangkang yang dipimpin oleh para ulama (teungku). Dayah tradisional yang berkembang sekarang antara lain ialah: 1) Dayah Darussalam di Labuhan Haji, Aceh Selatan; 2) Dayah Teungku Tanoh Mirah di Samalanga; 3) Pesantren Budi di Lamno, Aceh Barat; 4) Dayah Inshafuddin di Aceh Besar, dan ratusan dayah lainnya.

b. Lembaga Pendidikan Madrasah

Lembaga pendidikan ini menganut sistem sekolah murni di bawah Departemen Agama Republik Indonesia. Sistem pendidikan ini memiliki jenjang: Taman Kanak-Kanak(TK), Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN), masa pendidikan 6 tahun; Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN), masa pendidikan 3 tahun; Madrasah Aliyah Negeri (MAN), masa pendidikan 3 tahun; dan Universitas Islam Negeri (UIN) atau Institut Agama Islam Negeri (IAIN), masa pendidikan minimal 4 tahun.

c. Lembaga Pendidikan Umum

Lembaga pendidikan ini berada di bawah kendali Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas). Jenjang pendidikannya dimulai dari Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar Negeri (SDN), 6 tahun; Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN), 3 tahun; Sekolah Menengah Umum Negeri (SMUN), 3 tahun; dan Universitas Negeri (UN), minimal 4 tahun.

d. Kombinasi Pendidikan Dayah dan Umum

Sejak tahun 1985 berkembang pula sistem pendidikan kombinasi antara pendidikan tradisional dalam bentuk *dayah* dan pendidikan umum (modern) dalam bentuk sekolah, atau lazim disebut *dayah* terpadu. *Dayah* terpadu ini mencoba mengintegrasikan ilmu-ilmu agama Islam (*Islamic knowledge*) dengan sains (*science*). Pendidikan diselenggarakan dengan sistem sekolah dan asrama (*boarding school*), misalnya Dayah Bustanul 'Ulum di Langsa, Dayah Jeumala Amal di Lueng Putu, Pidie, dan Dayah Umar Dian di Indra Puri, Aceh Besar. Sistem pendidikan terpadu semacam ini sejak lama sudah lahir seperti di Madrasah Thawalib, Padang Panjang, Sumatera Barat; dan Pondok Modern Gontor, Ponorogo, Jawa

Timur. Perbedaan antara pendidikan terpadu dan pendidikan tradisional terletak pada muatan kurikulumnya. Pendidikan tradisional terbatas pada kajian ilmu-ilmu keislaman dengan kajian teks “Kitab Kuning”¹⁷; sedangkan pendidikan terpadu selain mengkaji “Kitab Kuning” juga mengajarkan sains dan keterampilan hidup (*life skill*) kepada para muridnya, misalnya keterampilan dalam bidang peternakan, pertanian, perbengkelan, olah raga, dan seni musik. Selain itu, diajarkan kepemimpinan dan kepramukaan. Bahasa yang digunakan dalam lingkungan pendidikan adalah bahasa Arab dan Inggris.

Keempat lembaga pendidikan tersebut mendapat tempat di hati masyarakat Aceh. Pada zaman penjajahan Belanda, sebagian orang Aceh lebih memilih pendidikan *dayah* atau madrasah daripada sekolah umum untuk menyekolahkan anak-anak mereka. Hanya orang-orang tertentu saja yang mau masuk sekolah umum. Apalagi sekolah-sekolah umum pada waktu itu dipimpin oleh orang Belanda. Sebagian kecil dari masyarakat Aceh, khususnya kalangan *Ulee Balang*, diberi kesempatan untuk mengenyam pendidikan di sekolah yang dipimpin Belanda. Sementara sebagian besar masyarakat Aceh menilai sekolah yang dipimpin Belanda itu tidak sejalan dengan ajaran Islam dan siapa yang belajar di sekolah itu dianggap kafir. Begitulah sikap sebagian besar masyarakat Aceh terhadap sekolah umum pada masa itu. Namun, belakangan sikap ini berubah dan bahkan sekolah-sekolah umum sangat diminati. Meskipun demikian, lembaga-lembaga pendidikan agama, terutama yang menggunakan sistem terpadu atau *dayah* terpadu paling digemari dan bahkan menjadi favorit.

¹⁷ Istilah “Kitab Kuning” digunakan oleh santri pesantren tradisional karena sehari mereka mengkaji kitab yang lembaran-lembarannya berwarna kuning dalam bahasa Arab; atau lazim disebut “Arab gundul.” Untuk mengkaji “Kitab Kuning” memerlukan waktu bertahun-tahun, bahkan sampai puluhan tahun. Kemudian, istilah “Kitab Kuning” ini menjadi karakteristik pesantren tradisional meskipun lembaran kitab itu tidak berwarna kuning, seperti kitab cetakan sekarang kertas yang dipakai umumnya berwarna putih. Namun, teksnya tetap dalam bahasa Arab tanpa syakal (Arab gundul). Informasi selanjutnya mengenai “Kitab Kuning” baca Martin van Bruinessen, *Kitab Kuning, Pesantren dan Tarekat*, (Bandung: Mizan, 1999).

2. Masjid Sebagai Sentral Kegiatan Masyarakat Aceh

Tidak diragukan lagi bahwa masyarakat Aceh sangat mencintai masjid. Kesalehan dan ketaatan seorang muslim ditandai pada ketekunannya mendatangi mesjid minimal lima kali sehari untuk melakukan shalat berjamaah. Shalat merupakan pilar Islam kedua setelah *syahadatain* (dua kalimat pernyataan keislaman seseorang). Setiap orang yang mengucapkan dua kalimat syahadat dengan penuh kesadaran, tanpa paksaan, dipandang telah menjadi seorang muslim. Sebagai perwujudan apa yang diucapkan itu, ia wajib melaksanakan shalat. Mendirikan shalat berarti menegakkan pilar Islam; sebaliknya, mengabaikan shalat berarti meruntuhkan pilar Islam. Sebab itulah masyarakat Aceh sangat menganjurkan anak-anak mereka menegakkan shalat sejak kecil. Anak yang sudah berusia enam atau tujuh tahun mulai diajarkan tatacara shalat dan bacaan-bacaannya di rumah. Ketika seorang anak mencapai usia sepuluh tahun, oleh orang tuanya diajak ke masjid untuk melaksanakan shalat secara berjama'ah. Shalat wajib lebih utama dilakukan di masjid, sedangkan shalat sunat lebih baik dikerjakan di rumah. Dalam pandangan Islam, shalat adalah kunci surga. Karena itu, masyarakat Aceh meyakini bahwa setiap orang yang melaksanakan shalat dengan ikhlas dan penuh khidmat (*khusyu'*) akan menjadi calon penghuni surga.

Sesuai dengan namanya, masjid berasal dari kata "*sajada*" berarti melakukan sujud, maka "*masjid*", secara literal, bermakna tempat sujud. Di Aceh, seperti di daerah lain, penganut agama yang setia, bila terdapat beberapa kampung yang letaknya berdekatan sehingga memungkinkan masyarakat berkumpul untuk shalat jama'ah dan shalat Jum'at, maka mereka membangun masjid. Biasanya setiap satu mukim, yang terdiri dari beberapa kampung, terdapat satu buah *masjid jami'*. Bahkan, di sebagian kampung (desa) daerah perkotaan terdapat tiga masjid dalam satu desa. Begitulah makna penting masjid bagi masyarakat Aceh sehingga masjid memiliki fungsi fundamental dalam kehidupan mereka. Maka, fungsi

utama masjid adalah sebagai tempat sujud yaitu tempat melakukan shalat dan ibadah-ibadah lainnya. Dalam konteks ibadah, masjid merupakan wahana untuk mendekatkan diri kepada Allah. Seorang muslim, dalam keadaan suci lahir dan batin, yang berada dalam masjid dengan tujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah disebut *i'tikaf*. Dengan melakukan *i'tikaf* ia akan memperoleh kekuatan spiritual dan hidayah dari Allah. Dan setiap hamba yang hatinya terpaut dengan masjid akan mendapat perlindungan Allah di hari Kiamat, di saat tiada tempat berlindung dari siapa pun.

Selain sebagai tempat ibadah, masjid juga sebagai pusat segala kegiatan sosial-keagamaan. Di dalam masjid diadakan pendidikan agama baik untuk anak-anak, remaja maupun orang dewasa. Selain itu, perayaan hari-hari besar Islam juga dilaksanakan di masjid. Perayaan hari-hari besar ini merupakan media pembelajaran sosial agar masyarakat lebih memahami dan menghayati ajaran Islam. Maka, setiap acara peringatan kelahiran (*maulid*) Nabi Muhammad, perjalanan nabi ke Masjidil Aqsha, Palestina, dan kemudian menuju angkasa luar (*isra'* dan *mi'raj*), tahun baru Islam, sejarah turunnya Al-Qur'an (*nuzulul Qur'an*), bulan Ramadhan (bulan puasa), pengajian atau ceramah agama, dan hari raya (*'Idul Fithri* dan *'Idul Adha*) masjid-masjid dikunjungi banyak orang. Bahkan, pelepasan jama'ah haji menuju tanah suci Makkah juga dilakukan di masjid. Dalam suasana ini, tampak persaudaraan dan persatuan di antara anggota jama'ah dan mereka benar-benar merasakan indahnya beragama. Dan masjid benar-benar berfungsi sebagai wadah pemersatu. Tambahan lagi, bagi masyarakat Aceh masjid merupakan pembangkit inspirasi dan motivasi *jihad*. Semangat juang ditanamkan kepada jama'ah di masjid. Dalam kaitan ini, masyarakat Aceh begitu mencintai masjid sehingga masjid tidak boleh diganggu atau dirusak. Ketika orang-orang Belanda mencoba membakar Masjid Raya Baiturrahman, yang terletak di jantung kota Banda Aceh, pada 1873 masyarakat Aceh mati-matian mempertahankannya. Kemarahan masyarakat Aceh mencapai puncaknya,

sehingga orang-orang Belanda terpaksa membangun kembali masjid kecintaan rakyat Aceh itu. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa simbol atau lambang tercapainya cita-cita dapat dilihat pada berfungsinya masjid dan komitmen umat Islam untuk memakmurkannya.

PENUTUP

Kehidupan masyarakat Aceh erat kaitannya dengan lembaga-lembaga sosial dan keagamaan, antara lain: *meunasah*, masjid, *dayah*, madrasah, dan kantor urusan agama. Hubungan antara masyarakat dengan lembaga-lembaga tersebut adalah karena sifat religius dan fanatik dalam beragama. Meskipun kadang-kadang pengamalan ajaran agama jarang dilaksanakan secara utuh dan disiplin oleh sebagian masyarakat, karena lemah keimanan dan ketaqwaan, rasa simpati terhadap agama sangat menonjol. Semua lembaga sosial dan keagamaan tersebut merupakan pusat perkumpulan anggota masyarakat meskipun secara umum peranan dan fungsinya berbeda antara satu dengan yang lain; namun tujuan akhir adalah sama. Lembaga-lembaga ini merupakan institusi-institusi pembinaan dan bimbingan masyarakat, baik menyangkut soal kehidupan beragama maupun kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Untuk memahami dinamika Islam di Aceh, antara lain, dapat ditelusuri melalui sejarah awal masuknya Islam ke Nusantara, peran ulama dan umara (penguasa), fungsi lembaga-lembaga pendidikan, dan cara masyarakat memahami dan mengamalkan ajaran Islam. Fenomena ini dapat dilihat dalam kehidupan sosial masyarakat Aceh yang ditandai dengan pengamalan *rukun* (pilar) Islam terutama shalat, puasa, zakat, dan haji. Mengenai shalat ini, masyarakat Aceh memandangnya sebagai ciri utama seorang muslim. Sedangkan puasa dilakukan setahun sekali setiap bulan Ramadhan; dan zakat diwajibkan bagi yang mampu secara ekonomi. Begitu pula kewajiban haji hanya kepada orang-orang yang mampu baik secara fisik maupun material, sekali dalam seumur hidup. Dalam kehidupan sehari-hari, syiar Islam begitu fenomenal ketika ada

perayaan hari-hari besar Islam, seperti hari raya *'Idul Fithri* dan *'Idul Adha*, peringatan maulid nabi, dan shalat *tarawih* di bulan Ramadhan. Indikasi ini juga ditemukan di kalangan masyarakat muslim di tempat-tempat lain.

Pada dasarnya, tidak jauh berbeda antara Islam di Aceh dengan daerah-daerah lain. Keunikan Islam Aceh adalah terletak pada semangat kefanatikan beragama yang diwariskan secara turun termurun secara primordial (*taken for granted*) sehingga orang-orang Aceh dikenal sangat agamis, meskipun pada kenyataannya tidak sepenuhnya mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. Secara sosiologis, masyarakat Aceh menempatkan agama sebagai standard kebenaran dan kebaikan dalam sistem pergaulan sosial dan adat istiadat. Adat tidak dapat dipisahkan dari syari'at dan syari'at harus berlandaskan *kitabullah* (al-Qur'an) dan sunnah Rasulullah. Pemisahan keduanya dianggap telah menyimpang dari hukum Allah, dan setiap penyimpangan itu disebut kafir dan sesat. Karena itu, ulama merupakan rujukan utama bagi masyarakat untuk mengetahui benar atau salah suatu masalah yang mereka hadapi.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Hasjmy, (Ed.), (1993) *Sejarah Masuk dan Berkembangnya Islam di Indonesia*, Bandung: Alma'arif.
- A. Hasjmy, (1995) *50 Tahun Aceh Membangun*, Banda Aceh: MUI Aceh.
- A. Hasjmy, (1977) *59 Tahun Aceh Merdeka di Bawah Pemerintahan Ratu*, Jakarta: Bulan Bintang.
- A. Hasjmy, (1977) *Apa Sebab Rakyat Aceh Sanggup Berperang Puluhan Tahun Melawan Agresi Belanda*, Jakarta: Bulan Bintang.
- A. Hasjmy, (1978) *Bunga Rampai Revolusi dari Tanah Aceh*, (Jakarta: Bulan Bintang.
- A. Hasjmy, (1976) *Peranan Islam dalam Perang Aceh dan Perjuangan Kemerdekaan Indonesia*, Jakarta: Bulan Bintang.
- A.K. Jakobi, (1998) *Aceh Daerah Modal*, Jakarta: Yayasan Seulawah.
- Tim Penulis, (2003) *Aceh dalam Angka (Aceh in Figures)*, Nanggroe Aceh Darussalam: Badan Pusat Statistik dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
- Azyumardi Azra, (2004) *Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII & XVIII*, Jakarta: Prenada Media.

- Badruzzaman Ismail, (2002) *Mesjid dan Adat Meunasah sebagai Sumber Energi Budaya Aceh*, Banda Aceh: Majelis Pendidikan Daerah.
- M. Nur El Ibrahimy, (2001) *Peranan Tgk. M. Daud Beureueh dalam Pergolakan Aceh*, Jakarta: Media Da'wah.
- Martin van Bruinessen, (1999) *Kitab Kuning, Pesantren dan Tarekat*, Bandung: Mizan.
- Mukti Ali, (1964) *Alam Pikiran Modern di Indonesia*, Jakarta: Tintamas.
- Paul van't Veer, (1969) *De Atjeh Oorlog*, Amsterdam: De Arbeiderspers.
- Syarifudin Tippe, (2000) *Aceh di Persimpangan Jalan*, Jakarta: Cidesindo.
- Taufik Abdullah (Ed.), (1983) *Agama dan Perubahan Sosial*, Jakarta: Rajawali.
- Tim Penulis, (2003) *Akar Konflik Manusia*, Banda Aceh: Ar-Raniry Press.